

# KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA (IRLANDIA, PERANCIS DAN ITALIA)

Oleh: Suparto  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.  
Email: supartodandy@yahoo.co.id

## *Abstract*

*One reason for the establishment of the State Judicial Commission in Europe is to revive public confidence in the judicial world and a state agency that became a liaison between the powers of government (executive power) in this case the Department of Justice with the judiciary (judicial power). Until now 27 countries in Europe that have a similar state agency of the Judicial Commission. Judicial Commission in Ireland called the Courts Service, in France called the Conseil Supérieur de la Magistrature and in Italy called the Consiglio Superiore della Magistratura. Judicial Commission in Northern Europe are represented by Ireland has responsibility and authority in the area of technical policy and policy-making in the field of justice. While the Judicial Commission in Southern Europe represented by France and Italy have authority in determining the terms of a career, recruitment of judges, judges education and training, transfer and promotion of judges as well as the enforcement of discipline.*

*Keyword : Yudicial commition, eksistent and authority*

## **Abstrak**

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai lembaga negara sejenis Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan *Courts Service*, di Perancis disebut *Conseil Supérieur de la Magistrature* dan di Italia disebut dengan *Consiglio Superiore della Magistratura*. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggung jawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Sedangkan Komisi Yudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, kedudukan dan kewenangan.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial (*Judicial Commission, Judicial Service* atau *Courts Service*) di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara Eropa, dan pada sebagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien.

Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah *Pertama*, menjamin adanya independensi peradilan. *Kedua*, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peran *ketiga* dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa Utara.<sup>1</sup>

Dilihat dari *historical background* Komisi Yudisial di Uni Eropa, didirikannya Komisi Yudisial terinspirasi oleh munculnya gelombang demokrasi di Eropa Timur, yang menuntut terjadinya proses peradilan yang dipercaya oleh publik. Gagasan awal didirikannya Komisi Yudisial di Eropa adalah sebagai penghubung kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan independensi peradilan. Dalam konteks itu, peran utama Komisi Yudisial di Uni Eropa adalah menjamin sistem peradilan, mengajukan kandidat hakim yang profesional, memberikan pendidikan yang berkualitas kepada hakim, menguji kompetensi hakim, menegakkan kode etik hakim, mengembangkan jaringan publik dan mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dijabarkan dengan berbagai kewenangan lanjutan, yaitu ; menyangkut tindakan disipliner, penentuan karir hakim, seleksi hakim, pendidikan hakim, kebijakan umum pada bagian-

---

<sup>1</sup> Wim Voermans, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010. Hlm. 98-101.

bagian pelayanan publik yang ada pada peradilan seperti fasilitas anggaran, rumah dinas, dan peningkatan teknologi.

Untuk mengetahui lebih detil maka akan dijelaskan tentang Kekuasaan Kehakiman dan kedudukan serta kewenangan lembaga sejenis Komisi Yudisial di Eropa yaitu dua negara dari Eropa Selatan (Perancis dan Italia) dan satu negara dari Eropa Utara (Irlandia).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kekuasaan Kehakiman Dan Komisi Yudisial Di Irlandia**

#### **1. Kekuasaan Kehakiman Di Irlandia**

Dalam Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual. Para hakim Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut.

Kedudukan lembaga peradilan di Irlandia sangat dipengaruhi oleh cara Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi peradilanannya yang telah ada jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.<sup>2</sup>

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat

---

<sup>2</sup> Lihat, Pasal 35 ayat (2) Konstitusi Irlandia

Pertama (*Courts of First Instance*) dan tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (*Courts of Final Appeal*). Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari *High Court* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (*Courts with Local or Limited Jurisdiction*) terdiri dari *Circuit Court* dan *District Court*. *District Court* merupakan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. *District Court* memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). *District Court* melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan *Circuit Court* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. *Circuit Court* terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim anggota. *Circuit Court* memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh *District Court*. *High Court* merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. *High Court* terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden *Circuit Court* mengambil bagian di *High Court*.<sup>3</sup>

Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan *High Court* dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidaknya empat hakim dan Ketua atau Presiden *High Court*.

Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah sebagai peradilan tingkat

---

<sup>3</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002. Hlm. 36-37.

pertama. Tribunal ini misalnya *The Appeal Commissioners of Income Tax* (sengketa mengenai perpajakan), dsb.<sup>4</sup>

## 2. Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Di Irlandia

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama *Courts Service* dengan mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, *Courts Service* tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada *Courts Service*. Dengan pembentukan *Courts Service* pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.<sup>5</sup>

Tugas dan wewenang *Courts Service* dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada *Courts Service*. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada *Courts Service*, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.<sup>6</sup>

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan *Courts Service* berbeda dengan hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan *Courts Service* merupakan sebuah komponen dari suatu operasional peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar

---

<sup>4</sup> *Idem.* Hlm 38

<sup>5</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial....Op.Cit.* Hlm. 45.

<sup>6</sup> *Idem.* Hlm. 46. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004. Hlm. 13.

dan suatu pemecahan langsung sedang dirumuskan. *Courts Service* memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat manajemennya. Oleh karena itu, *Courts Service* memiliki seorang manajer (Kepala Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai *Courts Service*.<sup>7</sup>

## B. Kekuasaan Kehakiman Dan Komisi Yudisial Di Perancis

### 1. Kekuasaan Kehakiman Di Perancis

Organisasi peradilan umum di Perancis ditandai oleh besarnya jumlah lembaga peradilan. *Code de l'Organisation Judiciare* mengatur organisasi peradilan umum. Wewenang untuk melaksanakan peradilan pada kasus-kasus perdata di tingkat pertama ada pada *Tribunal d'Instance* (setara dengan pengadilan *cantonal* atau *county*) yang memeriksa gugatan-gugatan kecil. *Tribunal de Grande Instance* (setara dengan pengadilan distrik) berwenang memeriksa persengketaan perdata lainnya. Banding dalam kasus perdata dapat dibawa ke *Cour d'Appel* (setara dengan Pengadilan Banding). *Cour de Cassation* yang berkedudukan di Paris, yang melaksanakan fungsi pengadilan tingkat kasasi (setara dengan Mahkamah Agung).<sup>8</sup>

Terkait dengan masalah administrasi peradilan ada beberapa pembagian dan tingkatan. Administrasi pengadilan pidana, pada prinsipnya sama seperti pengadilan perdata, walaupun terdapat penyebutan yang berbeda. Dalam pengadilan tingkat pertama, *Tribunal de Police* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran, dan *Tribunal Correctionnel* untuk memeriksa tindak pidana (*delic*) umum. Untuk pemeriksaan tindak pidana berat (*crimes*), ada prosedur pengadilan khusus pada tingkat pertama untuk *Cour d'assises* (*Assises Court*). Permohonan banding dalam kasus pidana ditangani oleh *Chambres d'Apple Correctionnelles* (pengadilan pidana banding). *Cour de Cassation* di Paris juga berfungsi sebagai pengadilan kasasi untuk kasus-kasus pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Idem.* Hlm. 47.

<sup>8</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 65.

<sup>9</sup> *Idem.* Hlm. 66.

Di samping organisasi peradilan umum untuk perdata dan pidana, masih terdapat banyak pengadilan lain yang diberi wewenang untuk menangani persengketaan perdata dan pidana. Misalnya, terdapat pengadilan terpisah untuk anak di bawah umur (*Tribunaux pur enfants*), pengadilan militer (*Tribunaux militaires*), pengadilan niaga (*Tribunaux de commerce*), kemudian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum industri (*Conseils de prud'hommes*) dan sebagainya. Tatanan pelaksanaan peradilan perdata dan pidana oleh banyak lembaga peradilan yang berwenang ini sangat terfragmentasi.

Peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan administratif, atau persengketaan sebagai akibat dari suatu keputusan atau perlakuan organ administratif. Pada tingkat pertama, persengketaan administratif diperiksa oleh Tribunal administratif (pengadilan administratif). Sebagian dari kasus-kasus banding mengenai persengketaan administratif ditangani oleh *Cours Administratives d'Appel* (pengadilan administratif banding). *Conseil d'Etat* di Paris (*departemen contentieux*) berwenang memeriksa sengketa administratif yang diserahkan kepadanya. Kasus-kasus yang ditangani dapat meliputi sengketa administratif di tingkat pertama, kasus-kasus banding dari *Tribunaux Administratives* atau *Cours Administrative d'Appel* dan satu dua kewenangan lain.<sup>10</sup>

Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaraan Perancis memperoleh jaminan, baik secara fungsional maupun secara hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai "*Autorite Judiciaire*".<sup>11</sup> Konstitusi Perancis secara prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti yang fungsional. Lembaga peradilan ini disebut *Corp Judiciaire* yang terdiri dari *magistrate* tetap (*standing magistrate*) dan *magistrate* tidak tetap (*sitting magistrate*). Namun terdapat suatu jaminan konstitusional tambahan untuk menjamin

---

<sup>10</sup> *Idem.* Hlm. 66-67.

<sup>11</sup> Lihat Bab VIII Konstitusi Perancis 1958

independensi dari *sitting magistrate*, bahwa para hakim *magistrate* tidak tetap ketika sudah diangkat tidak dapat diberhentikan.<sup>12</sup>

## 2. Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Di Perancis

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil Superieur de la Magistrature. Conseil Superieur de la Magistrature*<sup>13</sup> (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan *Domstolsverket* lembaga Komisi Yudisial di Swedia. CSM mempunyai fungsi utama sebagai penyeimbang antara wewenang Presiden untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengangkatan *magistrate* dan melakukan manajemen lembaga peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.<sup>14</sup>

CSM berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis adalah implementasi manajemen hakim dan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega mereka diluar negara Perancis. Terdapat peraturan disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak memberi manfaat dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasi dan manajemen masing-masing pengadilan.

Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota *sitting magistrate*.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 72-73. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...Op.Cit.* Hlm. 13.

Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan hak pensiun dan pelarangan pelaksanaan tugas peradilan tertentu. Tidak dapat dilakukan banding terhadap sanksi disipliner.

Saat ini kepengurusan CSM terdiri dari anggota yang mayoritas merupakan bagian dari lembaga peradilan. Presiden Perancis mengetuai CSM dan Menteri Kehakiman berfungsi sebagai wakil ketua. Selanjutnya terdapat empat anggota, satu orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua *Assemblée Nationale*, satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*, dan satu orang dari lingkungan *Cour the Comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa anggota yang lainnya. Enam diantaranya diangkat *oleh sitting magistrate* melalui suatu sistem perwakilan. Keenam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan).<sup>15</sup>

## C. Kekuasaan Kehakiman Dan Komisi Yudisial Di Italia

### 1. Kekuasaan Kehakiman Di Italia

Konstitusi Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai hal yang utama. Ciri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan Departemen Kehakiman mengatur manajemen dan masalah anggaran pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan kenaikan pangkat hakim. Berbeda dengan di Belanda, Menteri Kehakiman Italia sama sekali tidak dapat mencampuri masalah pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim.<sup>16</sup>

Organisasi peradilan umum Italia terdiri dari 5 tingkat. Tingkat terendah adalah *Justice of the Peace (Giudici di Pace)* yang merupakan peradilan tingkat pertama, untuk perkara-perkara pidana dan perdata.

---

<sup>15</sup> *Idem.* Hlm. 73.

<sup>16</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial..., Op.Cit.* Hlm. 85

Peradilan tingkat kedua adalah *Preator (Preatori)* yang menangani kasus-kasus banding dari *Justice of the Peace*. Peradilan ini juga merupakan peradilan tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang agak serius. Selanjutnya, Peradilan Distrik (*Tribunali*) menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama dan banding terhadap putusan-putusan *Preatori*. Kemudian Pengadilan Banding (*corti d'apello*) menangani banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Distrik sebagai pengadilan tingkat pertama. Kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan dimungkinkan melalui Pengadilan Kasasi khusus (*corte di cassazione*) di Roma.

Disamping peradilan dengan yurisdiksi sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga hierarki khusus dalam yurisdiksi administrasi dalam sistem peradilan Italia. Banding terhadap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan hasil pemilu pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan administrasi regional (*tribunali amministrative regionali*) dengan kemungkinan banding kepada *Board of State*. Di samping pengadilan-pengadilan tersebut, masih terdapat lagi lembaga peradilan lainnya dalam bidang-bidang tertentu seperti kantor Auditor Jenderal, Mahkamah Militer, Panitia Perpajakan, Mahkamah Agung dan masalah pengairan dan juga Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Independensi peradilan pertama-tama dijamin secara hukum melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim biasanya diangkat seumur hidup dan pada prinsipnya tidak dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat diskors atau ditempatkan (mutasi) hanya melalui putusan pengadilan Tinggi *magistrate* atau yang disebut *Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Idem.* Hlm. 87.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 107 Alinea Pertama Konstitusi Italia

CSM ini merupakan suatu lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 105 Konstitusi Italia, secara hukum lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan dan kenaikan pangkat hakim, disamping mengambil tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim.<sup>19</sup>

*Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM) inilah yang dikenal sebagai lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi peradilan atau juga disebut juga dengan *The Superior Council of the Judiciary*.

## 2. Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Di Italia

CSM sesuai dengan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, menempatkan dan menaikkan pangkat hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim.

Hubungan antara Departemen Kehakiman dengan pengadilan ditentukan oleh sebuah model dimana independensi peradilan memperoleh prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah memperkuat independensi peradilan. Terdapat pembahasan di Italia mengenai perlunya control diri (*self control*) diantara berbagai organisasi pengadilan dalam hal pembuatan kebijakan sehubungan dengan pembelanjaan anggaran. Peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden CSM) lebih merupakan peran simbolik, atau setidaknya tidak memiliki peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan CSM. Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*.

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 105 Konstitusi Italia. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...Op.Cit.* Hlm. 10.

Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden *Magistrati Dirigenti* merupakan wewenang CSM.<sup>20</sup>

CSM yang didirikan berdasarkan Konstitusi 27 Desember 1947 memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari 1984 dan merupakan Komisi Yudisial pertama di Eropa. Pada saat ini, CSM terdiri dari 33 anggota. Tiga diantaranya merupakan anggota tetap yang diangkat melalui Undang-Undang yaitu Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi. Duapuluh anggota berasal dari lingkungan peradilan (*'togati'*) dan sepuluh anggota lainnya berasal dari luar organisasi peradilan (*'laici'*).

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*. Untuk diangkat menjadi hakim di Italia, pertamanya seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Penempatan hakim merupakan wewenang CSM. Penempatan tersebut memiliki sifat ganda. Di satu sisi penempatan dapat berlaku sebagai salah satu sanksi disipliner bagi seorang hakim, disisi lain penempatan yang tidak berhubungan dengan sanksi disipliner. CSM memiliki kewenangan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim. Hakim yang masih dalam masa pelatihan memperoleh suatu paket pelatihan wajib (*uditore giudiziario*).<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial, menurut Wim Voermans terdapat lima karakteristik umum lembaga Komisi Yudisial dari berbagai Negara di Eropa, yaitu :<sup>22</sup>

1. *Judicial Service Commission* adalah nama yang paling banyak digunakan oleh Negara-negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama Ketua Mahkamah Agung terbaik bahkan

---

<sup>20</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...., Op.Cit.* Hlm. 96.

<sup>21</sup> *Idem.* Hlm. 97.

<sup>22</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...., Op.Cit.* Hlm. x. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 12 – Tahun III, Jakarta, 2006. Hlm. 21.

juga hakim agung dan hakim lain di bawahnya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kecakapan.

3. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim.
4. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara.
5. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan termasuk promosi dan mutasi hakim.

Menurut Ahsin Thohari, alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan untuk membentuk Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :<sup>23</sup>

1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum.
4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen; dan
5. Pola rekrutmen hakim yang dilakukan terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik yaitu presiden atau parlemen.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Komisi Yudisial di Eropa utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggung jawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis dan pembuatan

---

<sup>23</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...Op.Cit.* Hlm. 1.

kebijakan pada bidang peradilan. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan hubungan masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan, untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik. Sementara Komisi Yudisial di Eropa selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).

### **Saran**

Komisi Yudisial di Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia. Komisi Yudisial di Eropa mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan dengan demikian diharapkan Mahkamah Agung menjadi institusi yang profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Voermans, Wim, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010.
- , *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.

### **Makalah dan Jurnal**

A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi - Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006.

**Peraturan Perundang-undangan**

Konstitusi Irlandia

Konstitusi Perancis

Konstitusi Italia